

Judul : Amankan tenda jemaah, Menag minta biaya haji 2026 dibahas
Tanggal : Jumat, 22 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Amankan Tenda Jemaah Menag Minta Biaya Haji 2026 Dibahas



Nasaruddin Umar

MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar memintakan DPR segera membahas biaya haji 2026. Alasannya, pembayaran layanan jemaah di Arab Saudi mepep. Kalau molor, tenda strategis jemaah Indonesia di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), bisa melayang.

Hal itu disampaikan Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang disiarkan virtual di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Dalam rapat itu, Nasaruddin menjelaskan, saat ini Pemerintah harus membayar uang muka sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026. Jumlahnya setara 627 juta riyal Saudi atau Rp 2,72 triliun.

Dana tersebut untuk layanan masjid di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Termasuk tenda, konsumsi dan transportasi.

"Kalau sangat terlambat, jemaah Indonesia bisa kehilangan lokasi tenda strategis di Arab Saudi," ujarnya.

Menurut Nasaruddin, tenggat pembayaran dari Pemerintah Arab Saudi jatuh pada 23 Agustus 2025. Jika melambat, biaya haji Indonesia bisa ditempatkan di Mina Jaddid yang jauh dari lokasi utama.

Dia menjelaskan, dasar perhitungan dana awal mengacu biaya haji 2025. Kata rata, 783 riyal per jemaah untuk tenda, 2.300 riyal untuk konsumsi, akomodasi dan transportasi. Dengan kuota 203.320 jemaah reguler, kebutuhan mencapai 627,24 juta riyal Saudi.

Dana diminta difasilitasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui mekanisme uang muka. Skema itu dinilai tidak menyalahi aturan.

Dana ini bukan tambahan baru, melainkan bagian dari BPH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 2026," jelas Menag.

Imam Besar Masjid Istiqlal ini menegaskan, mekanisme uang muka tidak menambah beban jemaah. Tidak ada pelanggaran regulasi, tidak ada risiko kerugian negara," katanya.

Nasaruddin mengungkapkan, urgensi pembayaran masjid ini lebih tinggi. Arab Saudi menerapkan aturan ketat terkait batas pembayaran.

"Kalau terlambat, risikonya serius," ucap Nasaruddin, mewanti-wanti.

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh mengambil risiko menunda. Pemerintah dan DPR kudu menjaga reputasi Indonesia di mata Arab Saudi.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menambahkan, persetujuan DPR penting agar persiapan bisa segera dilakukan.

Menurutnya, tahapan teknis di dalam negeri dan luar negeri harus dimulai lebih cepat.

"Perhatikan syarikah, penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi harus segera diantisipasi," katanya.

Dia menjelaskan, tahun lalu ada delapan syarikah yang melayani 221 ribu jemaah. Tahun depan, proses seleksi harus perlu verifikasi jemaah yang melunasi, penyediaan transportasi udara, dan penyediaan layanan kesehatan.

"Kami berharap DPR membeberikan agar persiapan tidak terlambat," harap Irfan.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid juga memberi catatan. Polibisi PKS ini menyuarai keterbatasan perberian informasi teknis dari Pemerintah sehingga waktu pembahasan ini dianggap terlalu dekat.

"Informasi soal jadwal pembayaran terlalu mepep. Kalau disampaikan sejak awal sidang DPR bisa dibahas lebih cepat," katanya.

Hidayat mengingatkan, tenggat pembayaran jatuh pada Sabtu 23 Agustus 2025. Hari itu libur di Arab Saudi, sehingga waktu terbatas.

"Kita banya punya beberapa jam efektif. Jumat dan Sabtu libur. Tidak jelas apakah kantor terkait di Saudi buka," ujarnya.

Dia menegaskan prinsip darurat tidak boleh mengabaikan tafa kelola yang benar. Menurutnya, ini darurat jangan sampai malah dijadikan alasan untuk penyimpangan.

"Eksesnya menyinggung pendirian transparansi dana haji. Dana harus dikelola sesuai syarikah dan tata kelola keuangan negara. Dia mengingatkan agar keputusan DPR dilandasi pertimbangan yang jelas.

"Ini untuk kemashlahatan jemaah dan menjaga citra Indonesia," ujarnya.

Hidayat menekankan, semua persyaratan harus dipenuhi agar penyelenggaraan haji berjalan baik.

"Selama tidak ada penyimpangan, haji bisa membawa manfaat," tegasnya.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang pun menyetujui penggunaan dana BPKH untuk pembayaran awal.

Dia menegaskan, pembayaran harus dilakukan segera. Jika masjid tidak segera dibayar, maka Indonesia bisa

kehilangan area tenda. Ini dinilai kondisi darurat.

Marwan menolak usulan pembayaran syarikah sekaligus. Kalau itu dibayar sekarang, pihaknya tidak berani ambil risiko.

Meski setuju pembayaran awal, dia mengingatkan perlunya memperhatikan jemaah disabilitas dan lansia. Dia menyoroti rancangan undang-undang haji yang masih dibahas.

"Kalau jemaah kita banya penyandang disabilitas dan lansia, kebutuhan mereka harus diperhatikan," katanya.

Marwan mencontohkan keterbatasan fasilitas transportasi ramah disabilitas dan layanan lansia di pemondokan. Hal ini harus diatur dalam undang-undang.

Dia juga mengingatkan keterbatasan kuota. Satu pembimbing untuk 1-35 jemaah.

"Kalau ada kuota khusus pembimbing, jemaah reguler akan berkurang," katanya. ■ J&K